

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan teknologi sebagai dampak globalisasi hampir berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, seperti mempercepat arus pertukaran informasi, menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja, dan berbagai pengaruh lainnya. Pada kenyataannya teknologi juga turut mempengaruhi mata uang suatu negara, yakni dengan terjadinya transaksi digital. Terdapatnya beberapa contoh dari transaksi digital, seperti digital banking, mobile payments, fintech, paypal, e-money, dan segala hal jenis aktivitas ekonomi yang berbasis elektronik. Penggunaan transaksi digital terus mengalami perkembangan di tengah derasnya arus globalisasi. Salah satu bukti pencapaian terbesarnya terbentuknya mata uang digital atau yang biasa disebut dengan *cryptocurrency* (Dong He et.al, 2016). *Cryptocurrency* membawa kontribusi baru dalam mentransformasi nilai tukar. Metode transaksinya memanfaatkan teknologi secara penuh dan bersifat *online*. Berbeda dengan konsep mata uang konvensional, sistematisasi *cryptocurrency* tidak diatur oleh bank sentral atau lembaga keuangan dalam penerapannya. Sistem transaksi *cryptocurrency* bersifat *peer-to-peer* yang tidak membutuhkan pihak ketiga atau *middleman* dalam melakukan transaksi (Xie, 2019). Setiap jaringan transaksi *peer-to-peer* akan tersimpan dalam database yang dikenal dengan istilah *blockchain*, demikian rekam transaksi yang ada tersimpan dalam sistem yang transparan dan bersifat publik (Scott, 2016). Pada dasarnya *blockchain* merupakan sistem penyimpanan data digital yang bersifat multi server, sehingga data yang tersimpan dapat direplikasi dan diverifikasi oleh server yang lainnya. Sejatinya *blockchain* dapat disamakan layaknya buku kas dalam sistem perbankan, dimana buku kas tersebut dapat diakses oleh seluruh pengguna *blockchain* dan tidak hanya terbatas oleh pihak otoritas (Scott, 2016).

Kemunculan mata uang *cryptocurrency* yang sangat pesat di seluruh dunia dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi perekonomian negara (Hackket, 2017 dalam Xie, 2019). Respon Tiongkok menjadi perhatian yang menarik dalam pasar mata uang *cryptocurrency*. Terlebih mata uang *cryptocurrency* sempat dipergunakan di negara tirai bambu tersebut, namun berujung memilih untuk menolak segala aktivitas *cryptocurrency* dan berupaya membuat mata uang digitalnya sendiri (The Law Library of Congress, 2018).



Gambar 1.1: Grafik perkembangan *cryptocurrency* di Tiongkok

Sumber: Coindesk dalam Pilarowsky & Yue, 2017.

Cryptocurrency mulai hadir di Tiongkok pada awal tahun 2013 dan bertahan hingga 2017, yang dimana pada awal tahun 2017 *cryptocurrency* terutama pada mata uang Bitcoin terus mengalami pertumbuhan, tercatat sebanyak 50 persen dari total kepemilikan pasar Bitcoin dunia berada di Tiongkok. Tiongkok merupakan negara dengan aktivitas *cryptocurrency* tertinggi di dunia, sebesar 70 persen produksi mata uang crypto berasal dari Tiongkok (Bambrough, 2018 dalam Pilarowski & Yue, 2017). Namun demikian implementasi *cryptocurrency* di Tiongkok terus mendapat respon tegas dari pemerintahan Tiongkok Secara bertahap Tiongkok menerapkan kebijakan melalui PBOC untuk memblokir semua aktivitas mata uang *cryptocurrency* global di Tiongkok. Diawali dari aturan mengenai larangan transaksi *cryptocurrency* di dalam negeri, pelarangan bank untuk mendukung penukaran *cryptocurrency*, menutup sistem pembayaran *cryptocurrency*, hingga upayanya dalam mewujudkan mata uang *cryptocurrency* sendiri (Zhang, 2018).

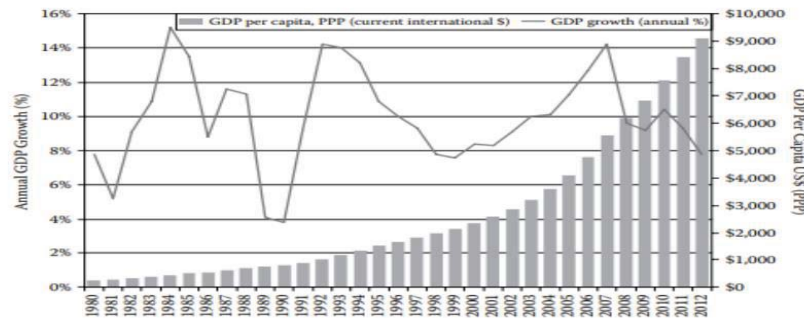


FIGURE 1.1 China's Economic Growth 1980–2012
Source: World Bank World Development Indicators.

Gambar 1.2: Grafik pertumbuhan ekonomi di Tiongkok 1980-2012

Sumber: He & Feng, 2019.

Melihat ancaman fluktuasi mata uang *cryptocurrency*, tentu mengancam perekonomian Tiongkok yang tengah mengalami peningkatan stabil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi ini didasari atas strategi upaya Partai Komunis Tiongkok (PKC) yang mampu menghadirkan kebijakan moneter berdasarkan pada atribut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok (Yangkuo & Guang, 2022). PKC merupakan partai pendiri Republik Rakyat Tiongkok yang diawali oleh rezim kepemimpinan Mao Zedong. Melalui paham Mao bersama PKC timbulnya cara pandang sosialis yang memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor bernegara, salah satunya sektor ekonomi. Terciptanya sistem ekonomi sosialis di Tiongkok memerlukan evolusi yang panjang, yang dimana sudah diterapkan oleh Mao Zedong sebagai bapak pendiri Tiongkok. PKC (Yangkuo & Guang, 2022). Peran pemerintahan negara sosialis memiliki andil yang besar terhadap perekonomian negara, terutama dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi baik dari segi produksi, distribusi, hingga konsumsi (Kompas, 2022). Hilangnya kontrol pemerintah atas mata uang *cryptocurrency* menjadi awal mula timbulnya urgensi bagi PKC terhadap potensi ancaman moneter domestik yang hadir di Tiongkok. Lantas PKC memilih untuk mewujudkan mata uang digitalnya sendiri, yang dikenal dengan digital yuan. Melihat langkah yang dilakukan oleh PKC menimbulkan pertanyaan atas motif yang dimiliki oleh PKC dalam melarang *cryptocurrency*, namun justru mengeluarkan mata

uang digitalnya sendiri. Terlebih mengingat bahwa belum adanya negara yang pernah menerbitkan mata uang digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Partai Komunis Tiongkok memiliki urgensi untuk mewujudkan digital yuan di Tiongkok ditengah kehadiran *cryptocurrency*?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Partai Komunis Tiongkok dalam mewujudkan digital yuan ditengah kehadiran *cryptocurrency* yang tidak sesuai dengan paham ekonomi sosialis moneter di Tiongkok.

1.4. Kerangka Berpikir

1.4.1 Globalisasi Ekonomi dalam Mendukung Varian Pembayaran Baru

Keberlangsungan globalisasi ekonomi diyakini dapat mempengaruhi perekonomian secara mendasar atau structural, yang kemudian pengaruhnya dapat berkelanjutan dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi (Zaroni, 2015). Pada dasarnya implikasi globalisasi ekonomi menciptakan semakin hilangnya batas-batas antar negara dalam melakukan kegiatan ekonomi, hal ini yang mendorong terjadinya kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Sejatinya perkembangan globalisasi ekonomi dapat meningkatkan dependensi maupun meningkatkan persaingan ekonomi antar negara. Pengaruh globalisasi memberikan dampak signifikan dalam aspek ekonomi, salah satunya terhadap transformasi nilai tukar sebagai alat pembayaran. Mengacu pada data world bank tahun 1981 hingga 2007 (World Bank, 2007 dalam Shin, 2009) globalisasi dianggap memunculkan integrasi baru dalam aspek ekonomi, seperti perdagangan internasional, *Foreign Direct Investment* (FDI) migrasi pekerja, dan arus modal antar negara.

Sejatinya tujuan utama dari globalisasi ekonomi adalah mempromosikan keadilan ekonomi secara global, yakni dengan meminimalisir keuntungan negara-negara maju yang mata uang negaranya dianggap lebih kuat dan mencegah negara-negara tertinggal terkena dampak dari fluktuasi (Haran, 2017). Globalisasi ekonomi mampu mengeliminasi hambatan-hambatan ekonomi, seperti transaksi perdagangan langsung, kebijakan moneter, ketidakpastian nilai tukar, dan lainnya. Haran (2017) menekankan bahwa implikasi globalisasi ekonomi menjadi ajang pemangkasan biaya dan resiko ekonomi global. Namun dilain sisi globalisasi ekonomi dianggap tidak melibatkan faktor perbedaan kelas antar negara, terkhusus pada pandangan negara-negara berkembang. Sejatinya implikasi globalisasi ekonomi ditengah adanya situasi kesenjangan antar negara, diyakini dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan yang lebih besar di masa depan (Zaroni, 2015 dalam Haran, 2017). Demikian globalisasi ekonomi akan dianggap kurang relevan, apabila penerapannya justru hanya menciptakan situasi zero-sum games bagi negara dalam perekonomian global.

Menurut (Goetzmann, 2017 dalam Bordo, 2021) nilai tukar mata uang terus mengalami evolusi mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi juga kerap mentransformasi aspek moneter, yang didasari atas dorongan pengaruh teknologi, perubahan selera masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan adanya tuntutan untuk menciptakan efektivitas dalam memenuhi fungsi uang. Pada awalnya komoditas pembayaran uang menggunakan koin yang dibuat dari emas dan silver, yang dimana komoditas tersebut menjadi salah satu bentuk alat tukar pada era tersebut. Implikasi teknologi dalam keuangan baru hadir pada abad ke-18 yang ditandai dengan konversi uang koin menjadi uang fidusia khusus yang dikeluarkan oleh bank penerbit. Selain itu pada abad ke-18 banyak negara yang mulai menerbitkan uang kertas sebagai alat tukar resmi dan tidak dapat diubah (Bordo, 2021). Uang kertas lebih efisien dibandingkan uang koin, hal ini menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang dipergunakan hingga saat ini. Namun demikian, uang kertas seringkali dikaitkan dengan inflasi dan adanya potensi ketidakstabilan yang tinggi. Terlebih pada awal abad ke-19 konstelasi internasional dihiasi oleh perang-perang besar, seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan berbagai perang lainnya yang menyebabkan terjadinya hiperinflasi.

Salah satu contohnya Amerika mendirikan Federal Reserve System pada tahun 1913, untuk menyediakan mata yang elastis dan berperan sebagai *lender of last resort* dalam mengatasi masalah kepanikan perbankan yang tengah berlangsung (Bordo, 2021). Pada awal abad ke-20 sejumlah bank sentral didirikan untuk menyediakan sistem pembayaran yang efisien, untuk memperbaiki kekurangan beberapa mata uang yang bersaing (Bordo, 2021). Beberapa dekade terakhir otoritas moneter meyakini bahwa implikasi perkembangan teknologi dapat mendukung operasional rezim uang dengan kadar inflasi yang rendah (Bordo, 2021). Pengemasan uang secara digital diyakini menjadi salah satu bentuk perkembangan nilai tukar yang terkini dan didukung dengan kemajuan teknologi yang kian mutakhir.

1.4.2 Peran Bank Sentral dalam Menjaga Nilai Tukar

Kelembagaan bank sentral menjadi relevan dalam menjaga standar uang dan memonopoli peredaran uang. Sifat dasar uang hanya terpenuhi oleh mata uang fiat atau uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral setiap negara, hal ini yang menjadikan uang fiat sebagai alat tukar yang legal dan segala transaksinya dijamin oleh bank sentral (Borio, 2014 dalam Criste & lupu, 2014). Demikian, alat tukar yang tidak dikeluarkan oleh bank sentral tidak memenuhi sifat dasar uang yang mengacu pada Melotte dan Moore (1995 dalam Bagus & Schiml, 2009). Mata uang *cryptocurrency* menjadi salah satu contoh mata uang digital yang tidak diawasi oleh bank sentral maupun otoritas resmi manapun. Menurut Edward Prasad seorang pakar ekonom (dalam CNBC, 2021) *cryptocurrency* berkontribusi pada ketidakstabilan moneter dan keuangan, terutama sistem keuangan mata uang kripto yang bersifat global dan tidak mendapat perlindungan dari lembaga resmi. Lantas bank sentral dianggap sebagai lembaga yang independen secara formal memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan dan menjaga kualitas mata uang. Menurut Spiegel (1988 dalam Bagus & Schiml, 2009) makna “independen” dalam bank sentral dimaksud bahwa institusi tersebut dapat mencegah terjadinya inflasi, serta menjamin stabilitas melalui kebijakan ekonomi. Umumnya setiap kebijakan ekonomi memiliki tujuan dan instrumen yang spesifik, namun demikian kebijakan

stabilitas keuangan dianggap bias dikarenakan tidak adanya parameter yang jelas tentang stabilitas keuangan.

Terdapat dua aliran umum peranan bank sentral dalam mendorong stabilitas keuangan. Cara pandang pertama menurut Eichengreen et al (2013, dalam Criste & Lupu, 2014) demi menuju stabilitas keuangan perlu adanya perluasan cakupan kebijakan moneter. Di lain sisi, terdapat pemikiran lain yang menganggap bahwa stabilitas keuangan menjadi satu tujuan utama bank sentral, yang dimana untuk mencapainya dapat melalui koordinasi dengan beberapa lembaga yang memiliki tujuan ekonomi yang sama (Svensson, 2013 dalam Criste & Lupu, 2014). Sebelum terjadinya krisis keuangan global, bank sentral mendefinisikan 4 dasar hubungan antara stabilitas keuangan terhadap kebijakan moneter, yaitu: 1) Stabilitas ekonomi dalam skala makro berbanding lurus dengan stabilitas harga; 2) Bank sentral memisahkan fungsi stabilitas keuangan dan stabilitas moneter; 3) Suku bunga menjadi instrumen utama kebijakan moneter bank sentral; dan 4) Permasalahan perekonomian dunia dapat diatasi melalui pendekatan mikroprudensial, yakni permasalahan ekonomi internal harus ditangani secara baik oleh bank sentral masing-masing negara (Borio, 2014 dalam Criste & Lupu, 2014). Nyatanya perbedaan ideologi bank sentral yang mengacu pada ideologi negaranya masing-masing juga kerap mempengaruhi kualitas uang, dimana masukan dari politisi maupun pernyataan resmi bank sentral dapat mengubah kualitas uang. Salah satu contohnya ketika ketua dewan Federal Reserve menyatakan bahwa Bank Sentral Amerika bertujuan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi, yang nyatanya publik menganggap bahwa adanya prediksi terjadinya inflasi di masa depan. Alhasil pernyataan kedua dewan ini menyebabkan terjadinya mata uang AS terdepresiasi, yang berujung meningkatkan harga komoditas barang dan jasa di luar AS (Bagus & Schiml, 2009).

1.4.3 Ekonomi Sosialis Tiongkok

Mao Zedong merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah berdirinya Tiongkok, peranannya sebagai *founding fathers* memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya ideologi negaranya. Kebijakan ekonomi politik Mao Zedong identik dengan pemikiran teori

ekonomi politik Karl Marx. Paradigma Marx atau marxisme memandang bahwa perbedaan kelas masyarakat antara kaum borjus dan kaum proletar harus dihapuskan, perbedaan kelas dianggap menghadirkan sistem kapitalisme yang menciptakan kondisi persaingan pasar dan kelas-kelas dalam kehidupan masyarakat yang berujung terciptanya kesenjangan (Sari, 2017). Mao bersama dengan Partai Komunis Tiongkok berupaya untuk menghapuskan sistem monopoli ditengah berjalannya rezim nasionalis Kuomintang, melalui perjuangan ini partai Kuomintang berhasil di gulingkan dan menjadi awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dibawah rezim partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949. Ideologi yang dipegang oleh pemimpin negara memilih pengaruh yang kuat dalam memberikan pengaruh dalam sistem negara, salah satunya dalam sistem ekonomi di Tiongkok. Kebijakan politik ekonomi sosialis menaruh perhatian pada kelompok masyarakat buruh-tani, yang dimana kesejahteraan dari sektor terkecil menjadi kunci utama kesejahteraan ekonomi Tiongkok. Melihat mayoritas penduduk Tiongkok pada era tersebut berkedudukan di desa, Kebijakan politik sosialis berfokus untuk menciptakan penguasaan alat produksi yang sejatinya dikuasai secara kolektif oleh negara, yang dimana ditujukan untuk menciptakan pembangunan industri nasional tanpa adanya investasi dari pihak asing. Menurut kaum sosialis investasi dianggap sebagai salah satu bentuk dari implementasi sistem kapitalis yang berujung terjadinya monopolisasi ekonomi di Tiongkok. Sistem ekonomi sosialis Tiongkok menjadi salah satu konstruksi yang dihasilkan oleh Mao Zedong, yang dimana masih diterapkan dan dianggap efektif pada perkembangan Tiongkok kontemporer. Dibawah kepemimpinan Xi Jinping saat ini Tiongkok diyakini masih menerapkan sistem ekonomi yang berpaham sosialisme, namun kerap menyesuaikan dengan konstelasi politik internasional. Menurut Xi Jinping (dalam Han et al., 2020) sistem ekonomi sosialis dianggap membawa aspirasi masyarakat yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan Partai Komunis Tiongkok. Sejatinya implikasi paham sosialisme pada rezim Xi Jinping tidak sepenuhnya mengacu pada paham sosialisme klasik, yang disesuaikan dengan karakteristik Tiongkok di era modern saat ini.

Menurut Marx dan Engels (dalam Fengen & Enfu, 2017) negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialisme memiliki pengaruh terhadap tiga sektor ekonomi, yaitu kepemilikan

produksi, pekerjaan, dan regulasi. Pada sektor produksi kaum sosialis meyakini bahwa makna kepemilikan pribadi dianggap sebagai salah satu agenda kapitalis, yang dimana kepemilikan produksi harus ditujukan untuk publik. Kaum sosialis menekankan bahwa kepemilikan alat-alat produksi harus berpusat secara nasional, yang dimana negara dianggap sebagai aktor yang bertugas untuk mengatur sistem ekonomi negaranya. Kedua, kaum sosialis kurang setuju mengenai konsepsi upah yang dibayarkan berdasarkan kemampuan. Kaum sosialis meyakini bahwa cara pandang tersebut keluar dari konsepsi pemahaman kaum sosialis yang meyakini penting adanya distribusi dalam pekerjaan. Tenaga kerja individu didefinisikan sebagai pekerja sosial, demikian hasil pekerjaan yang dilakukan dianggap sebagai hasil produksi yang bersifat kolektif. Ketiga, negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialisme memiliki pengaruh terhadap tiga sektor ekonomi, yaitu kepemilikan produksi, pekerjaan, dan regulasi. Pada sektor produksi kaum sosialis meyakini bahwa makna kepemilikan pribadi dianggap sebagai salah satu agenda kapitalis, yang dimana kepemilikan produksi harus ditujukan untuk publik. Kaum sosialis menekankan bahwa kepemilikan alat-alat produksi harus berpusat secara nasional, yang dimana negara dianggap sebagai aktor yang bertugas untuk mengatur sistem ekonomi negaranya. Kedua, kaum sosialis kurang setuju mengenai konsepsi upah yang dibayarkan berdasarkan kemampuan. Kaum sosialis meyakini bahwa cara pandang tersebut keluar dari konsepsi pemahaman kaum sosialis yang meyakini penting adanya distribusi dalam pekerjaan. Tenaga kerja individu didefinisikan sebagai pekerja sosial, demikian hasil pekerjaan yang dilakukan dianggap sebagai hasil produksi yang bersifat kolektif. Ketiga, kaum sosialis meyakini penting adanya regulasi yang terencana demi mewujudkan sistem ekonomi sosialis. Regulasi yang berdasar pada nilai-nilai sosialisme menjadi peranan yang penting dalam mewujudkan produksi ekonomi sosial yang stabil dan berkelanjutan. Terdapat dua aspek menjadi pertimbangan dari regulasi ekonomi sosialisme, yaitu cita-cita utopis paham sosialisme yang rasional untuk diterapkan dan mempertimbangkan konsekuensi dari sistem produksi kapitalis (Fan Peng, 2016 dalam Fengen & Enfu, 2017).

1.5 Hipotesis

Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang tidak melibatkan peran pemerintah memicu tantangan perekonomian di Tiongkok. Alasan Tiongkok mewujudkan digital yuan didasari oleh dua faktor. Pertama, menggeser *cryptocurrency* yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi sosialis Tiongkok di sektor keuangan digital. Kedua, digital yuan menjadi alat bagi PKC untuk tetap memiliki kontrol yang kuat terhadap masyarakat Tiongkok.

1.6 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi mengacu pada meningkatnya ketergantungan ekonomi dunia yang diakibatkan oleh perdagangan komoditas lintas batas, aliran modal internasional, dan perkembangan teknologi yang cepat (Shangquan, 2000). Globalisasi ekonomi dunia tengah mengalami perkembangan yang pesat yang didasari atas kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sistem ekonomi pasar yang telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Terjadinya globalisasi dikaitkan dengan adanya sebuah krisis ekonomi global yang kemudian menghadirkan solusi baru dalam menjawab permasalahan perekonomian global (Efremenko et al, 2018). Globalisasi justru dianggap memecahkan masalah persyaratan dari terjadinya krisis keuangan global. Globalisasi ekonomi juga berpengaruh terhadap sektor keuangan, yang dimana menghadirkan mata uang digital sebagai alat pembayaran. Menurut Winiarski (2006) *cryptocurrency* dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mendorong proses globalisasi karena sifatnya memenuhi kondisi globalisasi ekonomi, yakni berkembangnya sarana teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan internasional, dan berkurangnya hambatan pergerakan barang dan modal.

1.6.2 Sistem Dualisme

Dualisme merupakan cara pandang ekonomi dunia modern yang ditandai dengan adanya perluasan pasar global dan memunculkan inkorporasi baru dalam ekonomi internasional, yang dimana sistem dualisme tidak dianggap sama dengan liberalisasi pasar yang muncul

pada abad 16 (Gilpin, 1987). Berbeda dengan cara pandang liberalisasi yang memberikan kebebasan individu untuk terlibat dalam pasar, dualisme menganggap bahwa peranan aktor individu memiliki kekuasaan terhadap kapital. Pada dasarnya teori dualisme tidak menganggap adanya struktur resmi dan formal dalam ekonomi politik internasional, yang dimana setiap aktor hubungan internasional memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam konstalasi perekonomian internasional (Gilpin, 1987). Teori dualisme tidak memandang adanya peranan tatanan pemerintahan terhadap sistem perekonomian internasional, serta meyakini secara alamiah pasar memiliki prinsipnya sendiri tanpa keterlibatan rezim (Gilpin, 1987). Sistem dualisme menjelaskan bagaimana *cryptocurrency* sebagai mata uang digital global yang diciptakan oleh aktor individu dan mengancam rezim pemerintahan di Tiongkok. Penelitian ini berfokus bagaimana respon pemerintah Tiongkok terhadap kehadiran *cryptocurrency* yang menghadirkan dualisme dalam sistem moneter di Tiongkok.

1.6.3 Sosialis Ilmiah

Menurut Engels (1880) sosialisme ilmiah memiliki pandangan bahwa dalam mewujudkan perkembangan sosial dan politik perlu adanya perhatian yang besar terhadap kondisi perekonomian negara. Paham sosialisme ilmiah berbeda dengan cara pandang sosialis utopis, sosialisme ilmiah meyakini bahwa relasi sosial dan moralitas didasarkan pada perkembangan ekonomi mereka. Cara pandang ini juga meyakini bahwa sebuah sistem ekonomi yang berpaham sosialisme terbentuk tidak didasari oleh konstruksi sosial yang dapat diciptakan setiap saat yang berdasarkan oleh kehendak masyarakat, melainkan sistem ekonomi sosialis merupakan produk yang dibentuk oleh evolusi sosial (Engels, 1880). Nilai-nilai sosialisme menjadi peranan yang penting bagi pemerintah Tiongkok dalam mewujudkan produksi ekonomi sosial yang stabil dan berkelanjutan. Pada dasarnya sosialisme ilmiah meyakini bahwa kondisi perekonomian menjadi faktor penentu terjadinya perubahan sosial dan politik. Sementara itu penelitian ini berfokus untuk meninjau sistem moneter Tiongkok yang mendapatkan pengaruh kuat dari Partai Komunis Tiongkok sejak rezim pertama di Tiongkok.

Terlebih bagaimana upaya Tiongkok dalam mewujudkan digital yuan sebagai awal dari evolusi sosialis mata uang digital.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif. Penulis menjelaskan pengaruh *cryptocurrency* di Tiongkok, hingga terciptanya kebijakan pelarangan keberadaan mata uang *cryptocurrency*. Tipe penelitian ini juga membantu untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu situasi guna membangun, menjelaskan, memperluas, atau menguji sebuah teori. Meski demikian, tujuan penelitian ini bukan untuk menciptakan teori baru atau memperdebatkan sejumlah teori dan konsep, namun berfokus untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah serta menguji hipotesis.

1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini fokus kepada kehadiran *cryptocurrency* sebagai agenda globalisasi yang hadir di Tiongkok pada tahun 2013. Demikian implementasinya mengancam perekonomian Tiongkok, terutama ketidaksesuaiannya dengan agenda Partai Komunis Tiongkok yang mewujudkan perekonomian sosialis. Lantas pelarangan *cryptocurrency* dan upaya mewujudkan digital Yuan pada tahun 2017 menjadi strategi PKC untuk menciptakan keuangan digital domestik yang tetap melibatkan kontrol PKC terhadap perekonomian Tiongkok.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa kajian literatur atas berbagai sumber yang terkait. Adapun, sumber data dari penelitian ini turut terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data penelitian primer penulis mengacu pada argument regulator, kebijakan resmi, serta data-data empiris. Berikutnya sumber data sekunder penulis

turut menggunakan data dari studi literatur terdahulu, jurnal ilmiah, buku, berita, serta berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi ke dalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan, termasuk di dalamnya latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab kedua membahas mengenai perkembangan sistem moneter Tiongkok dibawah rezim Partai Komunis Tiongkok. Bab ketiga membahas bagaimana implikasi *cryptocurrency* ditanggapi oleh Tiongkok berdasarkan sistem sosialis. Bab keempat membahas bagaimana digital yuan sebagai alat Partai Komunis Tiongkok dalam mewujudkan agenda perekonomian sosialis domestik Tiongkok. Bab kelima berisikan kesimpulan penelitian.